

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu hubungan internasional pada awal masanya mempelajari hubungan antar bangsa yang dikarenakan negara merupakan pelaku utama dalam hubungan internasional. Perang besar-besaran yang terjadi di dunia yang terjadi dua kali yaitu Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II memperlihatkan bagaimana masif nya daya hancur perang antar bangsa yang sampai menciptakan penderitaan di penjuru dunia. Berbeda dengan penjajahan yang terjadi ratusan tahun lamanya, sebab hadirnya aliansi negara bangsa ini juga perkembangan teknologi militer menyebabkan bertambah sulitnya kehidupan antar bangsa ini. Munculnya penguasa yang bertekad untuk menguasai dunia seperti rezim Hitler mengakibatkan hubungan interanasional menjadi hubungan konflik, perang berkelanjutan tanpa akhir (Setiawan, 2020).

Studi Ilmu Hubungan Internasional pertama kali muncul pada tahun 1919. Yang mana di masa itu baru saja adanya fenomena Perang Dunia ke-I yang banyak memakan korban jiwa dan kehancuran material. Masyarakat dunia pada masa itu disibukkan dengan usaha- usaha rekontruksi pasca perang. Kemauan yang kuat untuk tak mengulangi fenomena mengerikan dalam peperangan itu membuat Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada masa itu dan sekaligus berprofesi menjadi professor di universitas dalam bidangnya yakni Ilmu Politik mempunyai tekad dalam misinya untuk memberikan nilai-nilai demokratis dan ideologi- ideologi Liberalisme (pemahaman) ke penjuru dunia. Wilson percaya bahwasannya dengan adanya nilai-nilai dan ideologi yang dipegang dapat menghindari peristiwa mengerikan yakni peperangan di masa yang akan datang serta dapat merubah sistem internasional juga tatanan domestik negara-negara otokratis (Jackson & Soronsen, 2005).

Perkembangan dalam studi ilmu hubungan internasional itu sendiri mempunyai sifat interdisipliner, yang dapat diartikan hubungan internasional itu tak lepas dari dari nilai- nilai ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya yang timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum bisa dilihat bahwasannya ilmu hubungan internasional tercipta dengan visinya yang

mencegah perang dan mewujudkan perdamaian. Hingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Andrias Darmayadi et al, 2015).

Buku Pengantar Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani menjelaskan: “Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005). Dengan dikarenakan hal itu Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan bahwasannya: “Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperlihatkan politik antar negara saja, akan tapi juga subjek lain seperti terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Artian hubungan internasional sudah berkembang cukup cepat di akhir abad ke-19, beberapa pakar hubungan internasional sudah banyak membeberkan pengertian-pengertian secara garis besar bahwasannya hubungan internasional ialah hubungan yang terjadi antara negara-negara dipenjuru sudut dunia. yang mana dinamakan hubungan internasional sendiri mempunyai bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kinerja hubungan internasional itu sendiri yaitu munculnya analisis mengenai perbandingan Politik Luar Negeri suatu negara, Hukum Internasional, Organisasi-Organisasi Internasional, perbandingan politik dan studi kawasan, studi-studi strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian internasional juga upayanya dalam penyelesaian permasalahan termasuk didalamnya pengendalian dan pelucutan senjata (Columbus et al, 1999).

Salah satu aktor modern dalam hubungan internasional ialah organisasi internasional yang digerakkan oleh pemerintah (government) atau Lembaga non-pemerintah (non- governmental). Sebagian besar studi hubungan internasional berfokus

pada organisasi yang digerakkan oleh pemerintah (Setiawan, 2020). Seperti *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) diciptakan berdasarkan Deklarasi Bangkok di tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara yakni, Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap menjadi Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Thanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina dan S.Rajaratman dari Singapura. Pembentukan perhimpunan ini pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik guna mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara anggota dari kepentingan *super power*, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara anggota dalam upaya menciptakan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara. Stabilitas terkait bisa diwujudkan melewati kerja sama ekonomi juga sosial budaya dan memajukan perdamaian tingkat Kawasan. Deklarasi ASEAN pun menggarisbawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk partisipasi negara-negara lainnya di Kawasan Asia Tenggara, selama negara-negara tersebut mempunyai komitmen yang serupa pada tujuan pembentukan kerja sama ASEAN (Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, 2008).

Awal mula ASEAN dibuat untuk memajukan kerja sama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosial budaya, bidang kerja sama politik dan keamanan belum disebutkan didalam Deklarasi ASEAN tersebut. Kerja sama politik dan keamanan baru dimulai dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971, dengan Deklarasi Kuala Lumpur yang disebut Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*) (ASEAN Secretariat, 1998). Kerja sama di bidang politik baru dimasukkan kedalam agenda resmi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke- I di Bali tahun 1976 dengan ditandatanganinya *The Declaration of ASEAN Concord I* dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. *ASEAN Concord I* ini menjadi dasar dalam kerjasama politik di negara ASEAN, sebelumm disahkannya *ASEAN Charter*.

Oleh sebab ini, ASEAN memiliki peran penting dalam menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi di dalam kawasan. Sampai pada tahun 1976 ASEAN belum memiliki suatu Lembaga yang bisa menyelesaikan konflik antar sesama anggota. Konflik antar anggota diselesaikan secara bilateral, antar negara yang mempunyai permasalahan saja. Permasalahan antar anggota tak bisa dibahas dalam forum ASEAN dan anggota ASEAN yang lainnya tak bisa mengutarakan opininya yang berkaitan dengan konflik itu sebab

dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Keikutsertaan pihak ketiga hanya bisa dilakukan jika para pihak yang berkonflik menyetujui keikutsertaan pihak ketiga tersebut dan tak mengikutsertakan ASEAN sebagai institusi politik.

Alat penyelesaian permasalahan di dalam organisasi ASEAN yang pertama kali ialah *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC)*. TAC merupakan satu-satunya instrument penyelesaian konflik yang dilakukan secara diplomatic. TAC juga menyatakan prinsip-prinsip dasar dalam berhubungan antar anggota ASEAN serta mengadakan rencana kerja sama anggota ASEAN untuk bekerjasama. Negara anggota ASEAN berharap melewati TAC ini diantaranya mereka bisa mengembangkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama yang saling membuahkan keuntungan yang bisa memperjelas eksistensi negara regional Asia Tenggara.

ASEAN terus mengalami perluasan menjadi sepuluh negara anggota yakni Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam tahun 1984, Vietnam tahun 1995, Laos tahun 1997, Myanmar tahun 1997, dan Kamboja tahun 1999. Akan tapi pada sisi lainnya dengan semakin luas keanggotaan ASEAN oleh sebab itu perbedaan-perbedaan intra ASEAN, khususnya antar negara anggota ASEAN lama dan baru menjadi semakin besar. Juga perbedaan budaya, agama, dan ras akan selalu terlihat sebagaimana dikatakan oleh Luhulima, suatu ASEAN yang lebih besar berarti “tantangan-tantangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan secara potensial lebih banyak persengketaan internal” (Bandoro & Gondomono, 1997).

Bertambahnya jumlah anggota ASEAN sudah mempengaruhi perkembangan ASEAN di waktu-waktu di masa depan terutama hubungannya dengan proses pengambilan keputusan yang akan semakin kompleks. Penambahan jumlah anggota akan semakin mempersulit efektifitas pengambilan keputusan, yang mana selama ini ASEAN berpegang teguh pada prinsip *ASEAN Way* yang salah satu prinsipnya mendasarkan keputusan pada konsensus dan tak ikut campur pada urusan anggota lain terlihat perlu dikaji ulang sebab proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih lama. ASEAN juga akan lebih sulit untuk mencapai satu suara mengenai suatu kebijakan tertentu. Semisal, persetujuan ASEAN atas masuknya Kamboja merupakan suatu contoh yang mana ASEAN tak selalu mencapai consensus. Konsensus ASEAN memerlukan waktu tiga tahun lebih

untuk menyetujui penggabungan Kamboja yakni dari bulan Juli 1997 sampai baru diterima secara resmi di tanggal 30 April 1999 (Fifth ASEAN Summit, 1995).

Pada tanggal 7 Oktober 2003 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke IX di Bali para pemimpin negara-negara ASEAN memproklamkan *Declaration of ASEAN Concord II Bali Concord II*) yakni penegasan kembali terbentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri atas tiga pilar, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio- Cultural Community-ASCC*) yang saling terikat juga memperkuat guna mencapai visi bersama demi menjamin perdamaian yang bisa dipertahankan, stabilitas dan kemakmuran yang terbagi di lingkungan Asia Tenggara. Sebagai ketua ASEAN saat itu Indonesia mengusulkan konsen *ASEAN Security Community (ASC)* bisa tercipta sejalan dengan pembentukann Komunitas Ekonomi ASEAN yang sudah diajukan sebelumnya oleh Singapura pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-VIII tahun 2002 di Kamboja (Ibid hal 6). Semua anggota negara ASEAN sadar bahwasannya proses integrase ASEAN perlu dijalankan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. ASEAN tak hanya terdiri kalangan pemerintah dan bisnis. Maka dari itu disepakati perlunya pilar ke-tiga yakni, *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)* sebagai proses integrase di bidang sosial budaya. *ASEAN Concord II* menjelaskan bahwasannya ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera di tahun 2020 (Ibid. hal 11-19).

ASEAN sebagai organisasi Kawasan yang cukup solid selama beberapa dekade terakhir mendapati tantangan yang cukup besar dalam menciptakan Visi ASEAN 2015. Sejumlah permasalahan di bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial dan lingkungan akan berdampak negatif bagi kredibilitas ASEAN. ASEAN harus melakukan perubahan kebijakan dan langkah strategis guna menghadapi rintangan-rintangan terkait. ASEAN perlu memberlakukan *consolidation and rebuilding* guna memperkuat pondasi-pondasi yang sudah diciptakan sebelumnya, juga menata suatu tahap bagi lahirnya suatu ASEAN yang kuat dan relevan pada perkembangan jaman.

Di tahun 2012 lahirlah *The Sustainable Development Goals (SDGs)* pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro. Yang tujuannya yakni untuk melahirkan berbagai visi yang luas guna memenuhi tantangan lingkungan, politik,

dan ekonomi yang dihadapi dunia. SDGs menggantikan *the Millenium Development Goals (MDGs)*, yang memulai upaya global pada tahun 2000. MDGs menetapkan tujuan terukur, yang disetujui secara luas guna mengatasi kemiskinan dan kelaparan, mencegah penyakit mematikan, memperluas Pendidikan dasar untuk semua anak di antara prioritas pembangunan lainnya (Ainin, 2021).

SDGs baru diresmikan pada Konferensi PBB bulan September 2015 di New York Amerika Serikat. SDGs berlaku untuk semua negara, hingga semua negara tanpa terkecuali negara maju mempunyai kewajiban sikap guna mencapai Tujuan dan Target SDGs. SDGs ialah komitmen berani untuk menyelesaikan dan mengatasi beberapa tantangan yang lebih mendesak yang dihadapi dunia sekarang. Dengan 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun kedepan (sejak 2015 sampai 2030) saling berhubungan, artinya keberhasilan dalam satu hal mempengaruhi kesuksesan lainnya. Berurusan dengan ancaman perubahan iklim berdampak pada bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang rapuh, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik membantu mengentaskan kemiskinan, dan mendorong perdamaian dan masyarakat inklusif akan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu ekonomi makmur (Ibid).

Maka dari itu ASEAN sebagai organisasi regional meluncurkan Laporan Dasar Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang pertama tahun 2020. Laporan ini melacak kemajuan kesepuluh negara anggota dalam capaiannya SDGs di negara anggota, yang memperlihatkan data terbaru guna menyajikan indicator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini pun menyoroti tak hanya indicator-indikator SDGs, akan tapi memberikan pengetahuan yang sangat diperlukan guna memperkuat kerja sama statistic antar Lembaga dan koordinasi data regional. Ini merupakan pertama kalinya SDGs disinkronkan dalam tingkat Kawasan sejak adopsi piagam ASEAN tahun 2015 dan diratifikasi oleh 10 negara anggota (Martinus, 2020).

Dalam mencapai pembangunan sosial, ASEAN juga sudah melakukan kemajuan yang signifikan, terutama dalam mencapai Tujuan ke-4 dan Tujuan ke-5 yakni Pendidikan Berkualitas dan Kesetaraan Gender.. Proporsi guru pada pendidikan pra-sekolah dasar yang sudah menerima setidaknya pelatihan guru minimum yang terorganisir telah meningkat secara signifikan dari 74 persen di tahun 2016 menjadi 84,5 persen di

tahun 2018. Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajer sudah meningkat dari 39,8 persen di tahun 2016 menjadi 43,6 persen di tahun 2018 (Ibid).

1.2 Masalah Penelitian

Hubungan internasional adalah sebuah ilmu studi yang tujuan awalnya untuk menciptakan perdamaian di seluruh dunia, hingga dari masa ke masa tuda di dalam hubungan internasional berkembang sesuai keadaan masanya. Terciptanya hubungan internasional tercipta pula perkembangan dunia saat itu dimana mulainya kesadaran dunia akan kerusakan demi kerusakan yang pada akhirnya setiap negara yang ada membentuk forum formal perkumpulan sebuah negara-negara yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk guna menciptakan dan mengembangkan perdamaian yang saat itu menjadi tujuan utama seluruh negara untuk memperbaiki kerusakan dunia yang ada. Dengan membahas persoalan seperti isu politik, keamanan, ekonomi hingga isu sosial- budaya dibahas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Berjalannya forum Perserikatann Bangsa-Bangsa maka ada kemajuan dari perkembangan organisasi internasional, yakni terbentuknya organisasi *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi internasional regional yang digerakkan oleh negara- negara (*state-actor*) berdaulat di benua Asia bagian Tenggara. Kesepuluh anggota ini bergabung untuk membahas isu-isu mengenai apa yang terjadi di Asia Tenggara seperti membahas persoalan Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*). Yang membahas tujuan terciptanya keamanan juga stabilitas Kawasan yang damai, bebas, dan netral.

Berkembangnya permasalahan dunia dari masa ke masa hingga pada di tahun 2012 tepatnya di Rio de Jainero dibuatnya *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dan di resmikan di New York Amerika Serikat di tahun 2015 yakni sebuah forum yang mempunyai visi untuk mensejahterakan masyarakat dunia hingga saat ini. Dengan 17 tujuan dan 169 target, ASEAN sebagai organisasi Kawasan turut andil dalam memajukan forum SDGs di Kawasan Asia Tenggara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan utama berupa “Bagaimana peran ASEAN dapat mendorong pencapaian SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas di negara Indonesia dan negara Singapura?”. Pertanyaan pokok selanjutnya telah penulis turunkan ke dalam pertanyaan operasional sebagai berikut :

1. Apa peran ASEAN dalam memfasilitasi pencapaian tujuan SDGs di bidang Pendidikan berkualitas di Indonesia dan Singapura?
2. Apa strategi ASEAN dalam melewati tantangan pencapaian SDGs di bidang Pendidikan berkualitas di Indonesia dan Singapura?
3. Bagaimana kebijakan ASEAN dalam memperkuat perannya mempromosikan target SDGs di bidang Pendidikan berkualitas di Indonesia dan Singapura?
4. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas peran ASEAN dalam mendorong SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis peran organisasi internasional, terkhusus ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura. Tujuan penelitian ini bisa diuraikan sebagai berikut

1. Analisa peran ASEAN dalam memfasilitasi pencapaian tujuan SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai inisiatif, program dan kebijakan yang dilakukan ASEAN untuk mendukung implementasi SDGs di tingkat regional dan nasional
2. Mengurai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas peran ASEAN dalam mendorong target SDGs di bidang Pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura, termasuk mekanisme koordinasi, hubungan antar negara Indonesia dan Singapura.
3. Mengidentifikasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mendorong pencapaian SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura. Studi ini akan menilai dampak dan kontribusi ASEAN dalam mencapai tujuan SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas serta mengidentifikasi

hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebabnya, tujuan studi ini yakni untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait peran ASEAN dalam mempromosikan capaian SDGs di bidang pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan Singapura, serta berkontribusi pada pengembangan hubungan internasional juga teori dan praktik pembangunan berkelanjutan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Studi ini mempunyai beberapa kegunaan yang bisa mempengaruhi konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan hubungan internasional. Berikut yakni beberapa manfaat dari penelitian ini:

- **Kontribusi ilmiah:** penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang hubungan internasional dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melewati analisis mendalam terkait peran ASEAN dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kajian ini bisa mengisi kesenjangan pengetahuan terkait kontribusi organisasi internasional terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya di Asia Tenggara.
- **Implikasi Praktis:** Hasil kajian ini bisa memberikan wawasan berharga untuk para pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun nasional untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, analisis terkait peran ASEAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya bisa menjadi panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam implementasi kebijakan dan program yang relevan.
- **Kepentingan praktis:** penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi para pelaku dan pemerhati pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Hasil penelitian bisa memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN dalam mencapai SDGs. Hal ini bisa menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan proyek pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.

- Kesadaran publik: disemansi hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran public akan peran penting organisasi internasional seperti ASEAN dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait kontribusi ASEAN dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa memotivasi masyarakat untuk secara aktif mendukung dan mempromosikan upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan regional.

Maka dari itu, penelitian ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi ilmu pengetahuan, kebijakan public, pelaku pembangunan dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut organisasi internasional seperti ASEAN.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, supaya dalam pembahasan tak melebar dan fokus terhadap inti permasalahan, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa karya jurnal dan situs penelitian terdahulu yang relevan, menjabarkan pengertian dari kajian kepustakaan, dan kerangka pemikiran dalam skripsi ini.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian akan menjabarkan jenis metodologi penelitian untuk membantu dan menyusun skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hasil yang sudah peneliti ambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan situs web resmi yang kredibel untuk menyusun skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis menyimpulkan apa yang sudah peneliti kaji dalam skripsi ini.